



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH RAPAT
RAPAT KERJA KOMISI IV DPR RI
DENGAN
MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI**

Tahun Sidang : 2021-2022
Masa Persidangan : V
Rapat Ke- : 12 (Dua Belas)
Jenis Rapat : Rapat Kerja
Sifat Rapat : Terbuka
Hari, Tanggal : Selasa, 14 Juni 2022
Waktu : Pukul 10.30 WIB s.d. 12.30 WIB
Tempat : Ruang Rapat Komisi IV DPR RI
Gedung Nusantara I (KK-IV)
Jl. Jenderal Gatot Subroto, Jakarta 10270
Ketua Rapat : Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP)
Acara : Pembahasan RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2023.
Sekretaris Rapat : Drs. Achmad Agus Thomy (Kepala Bagian
Sekretariat Komisi IV DPR RI)
Hadir : A. Anggota Komisi IV DPR RI:
36 dari 52 orang Anggota dengan rincian:

1. Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan
8 dari 11 orang Anggota
 - 1) Sudin, S.E./Ketua Komisi IV DPR RI
 - 2) Riezky Aprilia, S.H., M.H.
 - 3) H. Sunarna, S.E., M.Hum - Virtual
 - 4) Ir. Mindo Sianipar - Virtual
 - 5) Ono Surono, S.T.
 - 6) Dr. H. Sutrisno, S.E., M.Si.
 - 7) Vita Ervina, S.E., M.B.A. - Virtual
 - 8) Drs. Djarot Saiful Hidayat, M.S. - Virtual
2. Fraksi Partai Golongan Karya
6 dari 7 orang Anggota
 - 1) H. Dedi Mulyadi, S.H. – Virtual/Wakil
Ketua Komisi IV DPR RI
 - 2) H. M. Salim Fakhry, S.E., M.M.
 - 3) Firman Soebayo, S.E., M.H. - Virtual
 - 4) Ir. H. Hanan A. Rozak, M.S.
 - 5) Ir. Panggah Susanto, M.M. - Virtual
 - 6) Alien Mus – Virtual

3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya
6 dari 7 orang Anggota
 - 1) G. Budisatrio Djiwandono/Wakil Ketua Komisi IV DPR RI
 - 2) Ir. KRT. H. Darori Wonodipuro, M.M.
 - 3) Ir. H. T. A. Khalid, M.M.
 - 4) Dr. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.Sc.
 - 5) Ir. Dwita Ria Gunadi
 - 6) Dr. Azikin Solthan, M.Si. - Virtual
4. Fraksi Partai Nasional Demokrat
4 dari 6 orang Anggota
 - 1) Ir. Abdullah Tuasikal - Virtual
 - 2) Julie Sutrisno
 - 3) Yessy Melania, S.E. - Virtual
 - 4) Ir. Hj. Sri Kustina
5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa
4 dari 6 orang Anggota
 - 1) Anggia Erma Rini, M.K.M./Wakil Ketua Komisi IV DPR RI
 - 2) Luluk Nur Hamidah, M.Si., M.P.A. - Virtual
 - 3) Daniel Johan, S.E.
 - 4) Edward Tanur, S.H. - Virtual
6. Fraksi Partai Demokrat
3 dari 5 orang Anggota
 - 1) Drs. H. Guntur Sasono, M.Si.
 - 2) Hj. Nur'aeni, S.Sos., M.Si.
 - 3) Muhammad Dhevy Bijak Pawindu
7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera
3 dari 5 orang Anggota
 - 1) drh. H. Slamet
 - 2) Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, SP., M.M.- Virtual
 - 3) Prof. Dr. Hermanto, S.E., M.M.
8. Fraksi Partai Amanat Nasional
2 dari 3 orang Anggota
 - 1) Haerudin, S.Ag., M.H.
 - 2) Fachry Pahlevi Kanggoasa, S.E. - Virtual
9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan
0 dari 2 orang Anggota

B. Pemerintah

1. Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc.)
2. Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dr. Alue Dohong, S.E., M.Sc., Ph.D.);
3. Sekretaris Jenderal sekaligus Plt. Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem (Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M.);
4. Inspektur Jenderal (Ir. Laksmi Wijayanti, MCP.);
5. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Lestari (Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc.);
6. Direktur Jenderal Pengelolaan Daerah Aliran Sungai dan Rehabilitasi Hutan (Ir. Dyah Murtiningsih, M.Hum.);
7. Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim (Ir. Laksmi Dhewanthi, MA.);
8. Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan (Dr. Ir. Bambang Supriyanto, M.Sc.);
9. Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., M.P.M.);
10. Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (Ir. Sigit Reliantoro, M.Sc.);
11. Kepala Badan Standardisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Ir. Ary Sudijanto, M.Sc.);
12. Plt. Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (Dr. Ir. Ruandha Agung Sugardiman, M.Sc.);
13. Plt. Kepala Badan Penyuluh dan Pengembangan SDM (Drs. Ade Palguna Ruteka);
14. Plh. Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Berbahaya dan Beracun (Dr. Ir. Novrizal Tahar, IPM.);
15. Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove (Ir. Hartono, M.Sc.);
16. Direktur Utama Perum Perhutani (Wahyu Kuncoro);
17. Direktur Utama PT Inhutani I (Oman Suherman);
18. Direktur PT Inhutani II (Bakhrizal Bakri); dan
19. Direktur PT Inhutani IV (Sri Widodo).

Jalannya Rapat:

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E./KETUA KOMISI IV DPR RI):

(*suara tidak terekam*) satu orang dampingi saya agar Rapat Kerja hari ini berjalan dengan sah. Tolong siapa yang mendampingi saya.

Yang terhormat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan beserta jajaran,
Yang terhormat Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove,
Yang terhormat Direktur Utama Perum Perhutani beserta jajaran,
Yang terhormat Direktur Utama Inhutani I s/d V beserta jajaran serta hadirin kami hormati,

Mengawali rapat hari ini mari kita panjatkan puji dan syukur ke hadirat Allah *Subhanahu Wa Ta'ala*, Tuhan Yang Maha Kuasa karena berkat Rahmat dan Hidayah-Nya kita dapat mengadakan Rapat Kerja dalam keadaan sehat walafiat. Sesuai dengan Jadwal Acara Rapat Masa Persidangan V Tahun Sidang 2021-2022 yang telah diputuskan dalam Rapat Konsultasi Pengganti Bamus tanggal 28 Maret 2022 dan keputusan Rapat Internal Komisi IV tanggal 18 Mei 2022, pada hari ini Selasa tanggal 14 Juni 2022, Komisi IV menyelenggarakan Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka membahas RKA K/L dan RKP K/L Tahun 2023.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 276 ayat (1) Peraturan Dewan Perwakilan Republik Indonesia tentang Tata Tertib, Rapat Kerja ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum.

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.30 WIB)

Rapat Kerja ini kami mulai pada pukul 10.30 WIB dan akan diakhiri apabila bisa di pukul 13.00 WIB karena kami akan mengadakan Rapat Paripurna pada hari ini. Apabila belum selesai, dapat dilanjutkan sesuai dengan Pasal 254 ayat (2) Peraturan tentang Tata Tertib atau kesepakatan bersama, dengan susunan acara sebagai berikut:

1. Pengantar ketua rapat;
2. Penjelasan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
3. Tanggapan Anggota Komisi IV;
4. Jawaban menteri;
5. Kesimpulan rapat;
6. Penutup.

Apakah acara dapat disetujui?

(RAPAT:SETUJU)

Tolong siapa dampingi saya satu sini.

Bapak dan Ibu yang kami hormati,

Rapat Kerja hari ini merupakan tindak lanjut dari Rapat Dengar Pendapat Komisi IV dengan Eselon I Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan Kepala Badan Restorasi Gambut dan Mangrove yang dilaksanakan pada tanggal 9 Juni 2022. Dalam Rapat Dengar Pendapat tersebut, Komisi IV telah melakukan pendalaman RKA dan RKP Tahun 2023. Kementerian LHK dan Badan Restorasi Gambut mendapatkan dana sebesar 6,182 triliun, serta mendengarkan penjelasan mengenai usulan tambahan pagu anggaran indikatif Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2023 sebesar 2,140 triliun.

Ini sudah diajukan belum ke Badan Anggaran, ke Dirjen Anggaran maupun Badan Anggaran? Hah? Belum? Oh setelah nanti kami putuskan, oke.

Secara garis besar sebagaimana telah disampaikan dalam hampir seluruh kesempatan rapat, Komisi IV selalu mendorong agar semua program-program yang dilaksanakan oleh Kementerian Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dapat memberikan dukungan dan peningkatan ekonomi masyarakat terutama masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, disamping pelaksanaan tugas pokok menjaga dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup serta pengelolaan melestarikan hutan.

Catatan penting disampaikan oleh Komisi IV dalam kesempatan RDP sebelumnya adalah meminta agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk melaksanakan program-program kegiatan nyata dalam rangka:

- a. Menjaga kelestarian alam dan pemulihan lingkungan hidup, termasuk di antaranya kegiatan penegakan hukum, penghentian pemberian izin penggunaan hutan, kawasan hutan kecuali untuk kepentingan publik selama tidak bertentangan dengan kegiatan pelestarian tumbuhan dan satwa yang dilindungi serta kegiatan rehabilitasi hutan lahan;
- b. Meningkatkan ketahanan bencana perubahan iklim termasuk di dalamnya pencegahan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Sehubungan dengan hal tersebut Rapat Kerja hari ini ingin menjelaskan Saudari Menteri LHK dan Badan Restorasi Gambut terkait tindak lanjut dari saran masukan Komisi IV.

Terakhir saya masih mengingatkan, tolong bantu saya, sekali lagi tolong bantu saya taman-taman nasional disiapkan alat pemadam. Mungkin nanti di Agustus atau September ini kan pancaroba masih bisa saja terjadi kekeringan yang mengakibatkan kebakaran. Kalau sudah kebakaran, untuk rehabnya itu kan membutuhkan biaya yang besar sekali, lebih baik disiapkan pencegahan daripada pemberantasannya.

Bapak dan Ibu yang kami hormati,

Demikian pengantar kami sampaikan.

Selanjutnya kami persilakan Saudari menteri LHK untuk menyampaikan penjelasannya. Kami persilakan.

MENTERI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI:

Terima kasih Ketua yang terhormat.

Bismillahirohmanirohim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang kami hormati Pimpinan Komisi IV DPR RI,
Yang kami hormati Ibu dan Bapak Anggota Komisi IV DPR RI.

Pertama, kami menyampaikan rasa syukur pada Tuhan bahwa hari ini bisa Rapat Kerja kembali bersama Pimpinan dan Anggota yang terhormat Komisi IV DPR RI dan terima kasih atas Undangan Rapat Kerja. Dan juga tak henti-henti saya menyampaikan ucapan terima kasih atas dukungan, arahan, dan catatan-catatan penting bagi KLHK dan BRGM untuk peningkatan kinerja dan *warning-warning* atas hal-hal yang perlu menjadi perhatian di tengah-tengah masyarakat yang menjadi persoalan.

Pimpinan dan Ibu dan Bapak Anggota,

Saya mohon izin melaporkan bahwa ada empat dokumen. Pertama, RKAKP 2023, kemudian ada juga dokumen pagu rinci per Eselon I, ada juga dokumen RKA RKP-nya BRGM dan ada catatan awal indikasi pelaksanaan identifikasi kegiatan di dalam kawasan hutan di Riau yang masih baru laporan pendahuluan karena akan selesai pada bulan Juli. Sebagai tindak lanjut tadi yang terhormat Ketua juga sudah menyampaikan tindak lanjut Rapat Kerja dengan menteri dan RDP dengan para pejabat Eselon I, izinkan kami melaporkan kembali dan secara ringkas hal-hal berkenaan dengan RKA K/L tahun 2023 sebagai berikut.

Mohon periksa pada *screen 6*, tadi juga telah disampaikan oleh yang terhormat Ketua bahwa indikatif pagu indikatif KLHK pada rapat-rapat yang lalu juga telah kami laporkan yaitu sebesar 6,18 triliun dan proporsi alokasinya di dalam dukungan manajemen pengelolaan hutan untuk kualitas lingkungan hidup dan bencana, ketahanan bencana serta iklim dan pendidikan vokasi sebagaimana tertera pada halaman 6. Dan proporsi konfigurasi per Eselon I dan BRGM mohon periksa pada halaman 7 di 6,18 triliun itu termasuk yang besar di DAS dan di konservasi, serta di penegakan hukum dan Sekretariat Jenderal.

Pimpinan dan Ibu Bapak Anggota,

Terkait dengan anggaran berbasis masyarakat untuk tahun 2023 mohon periksa pada halaman 8 yaitu sebesar 975 miliar. Kami laporkan juga ini meningkat dari tahun sebelumnya di 2022 dan mohon periksa per unit kerjanya pada halaman 9 sampai dengan halaman 12. Kalau kita lihat, maka anggaran yang besar mohon periksa pada halaman 13 itu bisa dirinci, bisa dilihat juga catatan-catatan Provinsi mana yang menjadi tempat kegiatan. Jadi anggaran untuk berbasis masyarakat pada halaman 9 itu yang besar untuk DAS jadi

untuk RHL bibit berkualitas dan kebun bibit. Kemudian yang besar-besar lagi juga untuk, mohon izin Ketua, PPKL dan juga untuk KSDAE. Kemudian rincian per provinsinya mohon periksa pada halaman 13 sampai dengan 18. Jadi yang di PHL, di DAS ada yang untuk ke-33 Provinsi yang untuk DAS misalnya tetapi ada yang menyebut Provinsi-provinsinya misalnya untuk PHL di Aceh, Sumut, Sumsel, Lampung, Sumbar, Kaltim, Kalteng, Kalbar, dan seterusnya. Jadi mohon periksa pada halaman 13 sampai dengan halaman 18 itu sudah lengkap per unit kerja Eselon I dan pada lokasi di Provinsi mana saja.

Pimpinan dan Ibu Bapak Anggota,

Selanjutnya, kami mohon izin melaporkan tentang Rencana Kerja Pemerintah untuk tahun 2023 seperti juga pada Rapat Kerja yang lalu telah kami laporkan ada tema pembangunannya di halaman 20. Kemudian juga sasaran ekonomi makro dan *Roadmap* pada halaman 21 dan 22 juga pokok-pokok kebijakan fiskal ini masih seperti yang lalu.

Nah, kalau kita lihat rancangan kinerja pada halaman 24, kita masih *straight* pada pilar lingkungan dengan, dengan kinerja utamanya pada halaman 24 dan juga pada pilar ekonomi yaitu berkenaan dengan kontribusi sektor lingkungan hidup dan nilai ekspor, serta PNBK pada halaman 25. Dan juga pada pilar sosial yaitu terkait dengan legitimasi dan minimal legitimasi untuk rakyat akses, akses lahan hutan bagi masyarakat dan juga minimalisasi atau mengurangi konflik-konflik tenurial. Kemudian pada pilar tata kelola, yaitu berkaitan dengan tata kerja atau nilai kerja dan reformasi birokrasi.

Pimpinan dan Ibu Bapak Anggota yang kami hormati,

Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas catatan-catatan yang memberikan stimulasi atau inspirasi untuk penyelesaian yang cepat masalah-masalah lingkungan dan kehutanan. Namun, memang kemudian dia mengandung implikasi anggaran. Pada halaman 29, kami melaporkan usulan penambahan pagu anggaran KLHK untuk tahun 2023, yaitu senilai 2,14 triliun. Jadi dari 6,8 kami mohon izin untuk dapat mengusulkan tambahan sebesar 2,14 sehingga usulan pagu anggaran diproyeksikan menjadi 8,39 triliun.

Selanjutnya, pada halaman 30 mohon periksa, kalau kita lihat sebaran usulan tambahan untuk per unit kerja Eselon I yang kalau kita lihat usulan-usulan paling besarnya secara berturut-turut adalah Planologi, PKTL 730 miliar ini untuk kegiatan tata batas dan reforma agraria, serta yang 732 miliar, kemudian KSDAE 50 eh 500 miliar ini untuk kegiatan-kegiatan konservasi, kemitraan konservasi, kemudian Bina Cinta Alam, pembinaan habitat oleh masyarakat, pengembangan kelompok masyarakat, dan lain-lain. Dan juga yang ketiga, Direktorat Jenderal DAS RH sebesar 308 miliar untuk kegiatan kebun bibit rakyat di berkualitas dan bibit produktif. Juga BRGM sebesar 140 miliar untuk keperluan rehab mangrove dan penguatan pemberdayaan masyarakat penguatan usaha masyarakat dan pengembangan desa mandiri peduli mangrove. Demikian pula besaran berikut, 123 miliar yaitu Ditjen PPKL untuk keperluan instalasi pengolahan air limbah, pemulihan lahan bekas

pertambangan rakyat dan penanggulangan pencemaran kerusakan wilayah pesisir dan laut. Ini pada halaman 31 sampai dengan 34.

Ibu dan Bapak Pimpinan Anggota Komisi IV yang kami hormati,

Selanjutnya, pada dalam kaitan untuk lokasi berbagi usulan penambahan ini, mohon periksa pada halaman 35 sampai dengan halaman 40 yaitu berkaitan dengan di mana saja lokasi-lokasi untuk areal dalam kegiatan yang kami usulkan untuk penambahan. Misalnya pada halaman 35 untuk fasilitasi UMKM untuk legalitas produk kayu di Provinsi-provinsinya, mohon periksa ada catatannya. Kemudian misalnya lagi kalau kebun bibit rakyat, bibit berkualitas dan bibit produktif untuk seluruh Provinsi. Kemudian pengukuhan hutan ini juga tidak seluruh Provinsi tapi di terbatas pada banyak Provinsi, mohon periksa pada halaman 38 dan juga reforma agraria kira-kira seperti itu.

Selanjutnya, di KSDAE pada halaman 42 menyangkut 500 kelompok misalnya, kemudian pada halaman 43 pemulihan ekosistem KSDAE di 34 prose dan seterusnya. Dan juga untuk penyuluhan berupa, berupa penyuluhan dan diseminasi kepada kelompok-kelompok masyarakat. Fasilitasi pengembangan Desa Wanawiyata dan juga di perhutanan sosial di halaman 46 bagi 915 kelompok masyarakat berupa Bank Pesona dengan daftar Provinsi mohon periksa pada halaman 46. Demikian pula penegakan hukum, kemudian pada halaman 47 dan 48 dan juga untuk dukungan instrumen lingkungan hidup dan kehutanan.

Selanjutnya, kami berterima kasih atas catatan yang terhormat Ketua soal kebakaran hutan dan lahan. Kami terus mengikuti perkembangan di lapangannya dan kami juga mengusulkan untuk penguatan patroli terus-menerus dan penguatan masyarakat peduli api, mohon periksa pada halaman 50. Dan juga kemudian terkait dengan Ditjen Pengelolaan Sampah dan Limbah, yaitu pembangunan fasilitas limbah B3, kemudian pembangunan fasilitas pengelolaan emas tanpa merkuri dan lahan terkontaminasi juga untuk budidaya maggot di 55 unit di beberapa Provinsi, mohon periksa pada halaman 52 dan juga untuk motor sampah serta *Dump truck*.

Demikian pula fasilitasi di sini diskusi-diskusi Bimtek 55 kali dalam rangka pembinaan dan fasilitasi Bank Sampah. Juga instalasi pengolahan air limbah pada 55 unit pada semua Provinsi dan juga upaya untuk pemulihan lahan bekas pertambangan, mohon periksa pada halaman 54 untuk lokasi-lokasinya. Demikian pula dalam rangka fasilitas desa mandiri peduli gambut dan juga penanaman rehab mangrove serta pembentukan desa mandiri peduli mangrove.

Bapak Pimpinan dan Ibu dan Bapak Anggota yang kami hormati,

Akhirnya kami mohon persetujuan untuk kami dapat mengusulkan dan kami akan melaporkan kepada Menteri Keuangan usulan untuk tambahan Pagu Anggaran KLHK Tahun 2023, mohon periksa pada halaman 50, yaitu:

- Sekretariat Jenderal Rp449.826.374.000,-;
- Inspektorat Jenderal Rp70.541.651.000,-;

- Ditjen Pengelolaan Hutan Lestari sebesar Rp324.463.563.000,-;
- Direktorat Jenderal Pengelolaan DAS dan rehabilitasi hutan sebesar Rp1.470.096.098.000,-;
- Ditjen Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem sebesar Rp2.144.933.784.000,-;
- Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan sebesar Rp1.097.144.827.000,-;
- Badan Standarisasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp234.312.921.000,-;
- Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia sebesar Rp300.288.819.000,-;
- Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan sebesar Rp346.530.704.000,-;
- Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan sebesar Rp429.523.192.000,-;
- Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim sebesar Rp302.342.592.000,-;
- Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah dan Bahan Berbahaya dan Beracun sebesar Rp274.450.441.000,-;
- Ditjen Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Rp425.402.833.000,-;
- Jumlah KLHK Rp7.870.257.799.000,-; dan
- Badan Restorasi Gambut dan Mangrove Rp452.087.823.000,-.

Total menjadi Rp8.322.340.622.000,- ini sebagai pagu setelah perubahan dari penambahan sebesar Rp2.140.256.240.000,-.

Pimpinan dan Ibu Bapak Anggota yang kami hormati,

Saya mohon perkenan dukungan untuk usulan ini.

Terima kasih, kurang lebih mohon maaf.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Shalom.

Om Shanti Shanti Shanti.

KETUA RAPAT:

Terima kasih atas penjelasannya.

Barusan saya konsultasi dengan Pak Budi dan Ibu Anggia sebagai Pimpinan, perihal FGD bagaimana untuk Hari Rabu?

MENTERI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI:

Saya jawab, Ketua.

Saya mohon izin Ibu dan Bapak Pimpinan yang kami hormati, saya baru dapat laporan tadi pagi dari Pak Sekjen kelihatannya ada kesulitan untuk besok pagi. Jadi dari 6..

KETUA RAPAT:

Besok sore.

MENTERI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI:

Eh untuk besok sore kami sudah melihat kembali dan mohon diperkenankan untuk 6 FGD kita selesaikan dalam bulan Juni. Jadi kita ambil dua hari yaitu masing-masing 3 FGD per hari.

Mohon izin Pimpinan dan Anggota yang terhormat, saya mohon maaf atas kejadian ini dan kita akan laksanakan pada tanggal 20 Juni, hari Senin untuk 3 FGD dan tanggal 27 Juni juga hari Senin untuk 3 FGD. Jadi yang hari Senin 27 eh tanggal 20 Juni, yaitu FGD tentang RUU, kemudian FGD tentang KHDPK, dan tentang IKN. Jadi tetap 3 FGD kita laksanakan sehari pada tanggal 20 dan selanjutnya nanti tanggal 27 juga tiga FGD. Jadi kita selesaikan semuanya di bulan Juni.

Demikian Pimpinan, sekali lagi saya mohon maaf atas kekhilafan ini.

Terima kasih.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Izin Pak Ketua saya bicara sedikit.

Terima kasih Bu Menteri penjelasannya.

Pimpinan dan para Anggota Komisi IV yang saya hormati,

Saya rasa minggu lalu ya minggu lalu kita mengadakan Rapat Kerja bersama Bu Menteri juga, beberapa hal yang kita diskusikan ya termasuk urgensi beberapa keperluan kita untuk diskusi lebih dalam menyikapi beberapa isu strategis yang sama-sama kita hadapi. Nah, dalam kesepakatan kita bersama ya yang kita diskusikan minggu lalu ya beberapa tahapan yang perlu kita lalui bersama adalah melaksanakan beberapa Focus Group Discussion. Itu minggu lalu hari Kamis kalau saya tidak salah mohon nanti saya dikoreksi. Saya lupa.

F-P (.....):

Atau Mbak Ita suruh nampilin jadwalnya, Pak.

WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Ya, saya cuman mau ini saja ya ini kesepakatan kita bersama itu terjadi ya karena selama ini ya kita beberapa kali tertunda karena satu dan lain hal. Tadi, betul Pak Sekjen sempat berpesan kepada saya belum bisa karena belum siap hotel. Menurut saya ini alasan yang paling konyol yang saya pernah dengar di ruangan ini. Kita sudah menjadwalkan rapat-rapat ini sudah lebih dari satu minggu, kapan itu rapatnya. Tanggal berapa? 6 Juni, Rabu minggu lalu atau 6 Juni. Sudah hampir dua minggu lalu. Senin minggu lalu, maaf. Kita ini tidak perlu kita FGD di hotel juga tidak perlu, mau ruangan apa pun enggak masalah. Minggu lalu pun saya menekankan ya pada Rapat Kerja saya nanya karena pada waktu itu kita membahas ini kebetulan yang kita akan kita bahas ini Undang-Undang, Revisi Undang-Undang 590, betul? Besok jadwalnya itu. Ini ada permintaan untuk ditunda lagi. Ini kalau cuman urusan FGD saja ini enggak bisa *clear*, saya enggak heran kalau teman-teman Anggota ini ya mempertanyakan komitmen kita bersama ini seperti apa? Saya tidak pernah, coba bisa dicek ya teman-teman bisa cek, saya enggak pernah mau menunda-nunda rapat itu enggak, saya itu tidak setuju kalau kita menunda rapat tapi saya menghargai forum kalau memang ada yang perlu kita skors dulu untuk diskusi silakan karena perlu kesepakatan yang lebih, enggak apa-apa ya. Saya harap waktu itu sudah *clear* enggak ada masalah. Nah, kalau masalahnya itu tempat enggak ada, belum siap, jadi seminggu terakhir kok kayak gampang sekali alasannya, belum siap Pak, besok kita minta tunda lagi.

INTERUPSI F-PDIP (RIEKY APRILIA, S.H., M.H.):

Interupsi Pimpinan.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Sebentar Bu Kiki.

F-PDIP (RIEKY APRILIA, S.H., M.H.):

Ya kan interupsi boleh dong.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Boleh, setelah ini boleh, mau lama juga enggak apa-apa.

Ya saya pertanyakan kemarin apakah ini ada upaya menghalang-halangi lagi diskusi revisi Undang-Undang 590? Ya, karena kebetulan besok yang dijadwalkan topiknya seperti itu dan ini ada penundaan lagi. Saya enggak habis pikir benar-benar. Masalah ini saja ini kita harus sampai seperti ini, saya bingung.

Kita enggak mempermasalahkan Bu Menteri, Pak Sekjen mau di mana enggak apa-apa, tapi kita penting untuk kita ini duduk sudah benar-benar kita mendiskusikan apa saja yang menjadi *concern* kita bersama karena beberapa minggu lalu ya teman-teman perdebatkan kenapa ada rapat FGD di membahas

ini tapi Komisi IV tidak diundang, di Baleg. Jadi kalau seperti ini caranya ya saya minta Rapat Kerja ini ditunda lagi karena jelas tidak ada komitmen bersama. Saya enggak tahu saya jarang gebrak meja tapi hari ini saya kesal banget.

Silakan Bu Kiki.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Sebentar saya dulu.

Saya memberikan usul yang konkret Pak Budi. Tadi Pak Budi mengatakan tidak perlu di tempat hotel maupun di mana. Tadi usulan Pak Kanjeng di Manggala kan ada ruang rapat yang besar ya yang konon katanya di ruang rapat Ibu Menteri, bisa mencapai 100 orang. Kalau memang tidak bisa di hotel tetap saja dilaksanakan di sana tapi itu pun sesuai dengan kesepakatan para Anggota dan Pimpinan karena sudah dijadwalkan, itu saja.

Silakan.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Oke, Pimpinan.

Pertama saya coba mengingatkan, takutnya amnesia bahwa tanggal ini yang mem-*breakdown* itu Menteri dan Sekjen sendiri ya. Kami butuh dengan isu seperti ini adalah menggali informasi ya. Saya mohon maaf, apakah memang pemerintah tidak pernah menganggap serius DPR hari ini. Kalau memang dianggap enggak butuh, memang dianggap enggak ada apa-apanya, memang enggak butuh sama kami, ya silakan ya. Mohon maaf Pimpinan ada lima orang Pimpinan ini berarti enggak dianggap juga kali ya sama Menteri. Saran saya tunda Rapat Kerja ini dan apabila memang tidak ada kesepakatan bersama termasuk RKA RKP-nya, silakan sajalah Bapak, Ibu mungkin bisa jalan sendiri ya. Kami di sini intinya butuh informasi karena kita punya keterbatasan waktu juga untuk rapat di Komisi ini dan banyak hal yang sebenarnya untuk tidak terlalu elok disampaikan terkadang kalau memang ada di sini.

Jadi Pak Pimpinan, Pak Budi, Pak Sudin, tolong hargai pendapat Fraksi-fraksi yang sudah berkomitmen di sini, kecuali Pimpinan juga merasa tidak butuh Fraksi di sini, kami siap keluar. Silakan. Kami di sini duduk atas perwakilan seluruh Fraksi yang ada. Jadi kalau memang Pimpinan merasa juga ini boleh dianulir ya silakan mungkin itu Pimpinan sendiri, tapi kalau kami dari Fraksi PDI Perjuangan sudah meragukan apa komitmen Bu Menteri.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Saya tidak menganulir. Saya jelaskan saya tidak menganulir, tapi tadi karena hotelnya tidak ada maka saya runding sama Pak Budi masukan dari Kanjeng tempatnya dipindah, tetap dilaksanakan, kan begitu. Maka nanti masing-masing Fraksi mengatakan “Oh setuju tempatnya di Manggala, tetap dilaksanakan”, ya silakan.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Kan begitu Mbak Kiki.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Sebentar Pimpinan.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Izin Alien sebentar.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Kami tidak permasalahan tempat. Yang kami pertanyakan jadwal ini jangan diubah lagi, kita kan juga sudah nyiapin waktu Pimpinan buat ini.

KETUA RAPAT:

Ya sudah kan tadi kan sudah dijelaskan.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Pimpinan, izin sebelah kiri Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya Mbak Alien.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Saya pikir kita tidak perlu perdebatkan ini, kita *break* sebentar karena sebentar lagi itu waktunya Paripurna. Jadi ini waktunya juga kita akan membahas, saya pikir konkret kita *break* sekarang dan kita bahas ini dan setelah itu kita masuk, konkret Pimpinan.

Terima kasih. Tidak perlu lagi kita bahas panjang kali lebar waktu. Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ya Pak Haerudin.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag, M.H):

Terima kasih Pimpinan.

Saya setuju dengan Mbak Kiki, Mbak Alien, kita *break* tapi paling tidak ada biar ada kepastian Pimpinan, kita rapat konsultasi sebentar. Panggil semua mewakili Poksi panggil juga dari Bu Menteri dan yang mewakili untuk menyetujui ini yang sejatinya kesepakatan ini enggak boleh berubah.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Oke, saya minta Sekjen sama Ibu Menteri sama perwakilan Poksi runding dulu di ruang makan. Saya skors 15 menit.

(RAPAT DISKORS PUKUL 11.04 WIB)

(SKORS DICABUT)

Sekarang pendalaman pandangan para Fraksi. Saya mohon dengan hormat karena kita jam 13.00 WIB ada Paripurna. Saya minta bicaranya singkat sesuai dengan Tatib tiga menit. Silakan Pak Budi atau Bu Anggia.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Terima kasih, Pak Ketua.

Terima kasih Bu Menteri, Pak Sekjen, Pak Wamen dan rekan-rekan. Kita telah memantapkan tekad kita bersama dan berikutnya mengingat waktu ya Bapak, Ibu sekalian juru bicara Fraksi, karena kita ada Rapat Paripurna sebentar lagi kita minta *straight to the point* sesuai Tatib tiga menit.

Kami persilakan yang pertama Ibu Dwita Ria Gunadi dari Fraksi Partai Gerindra. Silakan Bu.

F-P. GERINDRA (Ir. DWITA RIA GUNADI):

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalamu'alaikum Warahmatullah Wabarakatuh.

Yang saya hormati Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI, Ibu Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia, Bapak Sekjen dan seluruh Pejabat Eselon I, Kepala Badan Restorasi Gambut Mangrove beserta jajarannya.

Izinkanlah saya, Dwita Ria Gunadi menyampaikan catatan, tanggapan, masukan, pertanyaan mewakili Fraksi Partai Gerindra.

Pertama, Pagu Indikatif KLHK Tahun 2023 sebesar 6,18 triliun dan ada usulan tambahan sebesar 2,14 triliun sehingga pagu anggaran menjadi 8,32 triliun. Fraksi Gerindra meminta agar pengalokasiannya benar-benar difokuskan untuk mendukung program prioritas nasional dan penataan serta penyelesaian masalah lingkungan hidup yang masih terjadi sampai saat ini, serta melakukan pengawasan yang maksimal.

Yang kedua Bu, Fraksi Gerindra mengapresiasi KLHK yang telah meningkatkan indikasi anggaran berbasis masyarakat sebesar 81,33% pada tahun 2023. Kami meminta agar kegiatan ini dapat direncanakan dan dilaksanakan dengan baik sehingga pelaksanaannya tidak terburu-buru pada mendekati akhir tahun agar tujuan pemberdayaan masyarakat tercapai dan tidak hanya sekedar pencapaian realisasi saja.

Yang ketiga, sanksi administrasi terhadap pelaku pelanggaran izin kehutanan tidak membuat efek jera selama ini Bu karena sifatnya hanya administratif. Untuk itu, Fraksi Gerindra meminta KLHK membuat aturan yang tidak berhenti di pencabutan izin tapi harus meminta pertanggungjawaban hukum pada perusahaan izin yang dicabut.

Yang terakhir Bu, rencana audit perkebunan kelapa sawit bulan Juni 2022 ini yang akan memeriksa 92 perusahaan. Kami, Fraksi Gerindra minta langkah apa yang akan dilakukan. Tolong diberikan secara transparan. Masalahnya mendesak untuk diselesaikan audit adalah kawasan hutan, ketimpangan penguasaan lahan dan konglomerasi lahan sawit. Kami meminta agar audit perusahaan sawit tidak hanya berhenti pada kepastian legalitas karena di lapangan masih banyak yang terjadi konflik.

Mungkin itu saja, laporan selanjutnya akan saya berikan secara tertulis.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Terima kasih, Bu.

Kita lanjut Pak Sutrisno Fraksi PDI Perjuangan.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si.):

Terima kasih, Pimpinan.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan beserta Bu Menteri beserta jajaran.

Sebelum menyikapi RKA, Bu Menteri, bahwa tahun 2023 El Nino itu siklusnya akan di wilayah kita begitu. Hutan kita sangat luas juga tingkat kerusakan tinggi tentunya rentan terhadap kebakaran, tanpa memberdayakan masyarakat agak sulit nampaknya. Sejak kami di ruangan ini berkali-kali mengusulkan bahwa MPA (Masyarakat Peduli Api) ini manusia ya tidak mendapatkan apa-apa, tolong disentuh ini minimal dikasih seragam ya supaya ada perhatian, syukur seragam MPA itu nanti disampaikan pada saat Bimtek. Bimtek saja sampai hari ini juga belum dilaksanakan.

Kemudian terkait dengan RKP dan RKA, Bu Menteri. Dengan keterbatasan anggaran 6,18 triliun dan mayoritas disedot untuk belanja dukungan manajemen lebih daripada 50%, pertanyaannya adalah Bu Menteri, bagaimana dalam mencapai apa namanya target capaian karena tema daripada RKP 2023 adalah untuk peningkatan produktivitas untuk transformasi ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan. Dalam kondisi anggaran untuk pemberdayaan non operasional sangat kecil, pertanyaannya adalah bagaimana penyesuaian kegiatannya dengan anggaran yang terbatas. Belum lagi tidak nampak bagaimana belanja untuk perbedaan masyarakat-masyarakatnya.

Kemudian yang kedua, KLHK dalam mendukung program nasional ada tujuh, di antaranya pembangunan fasilitas pengolahan limbah B3. Saya hanya ingin mengingatkan Bu Menteri, urusan ini sudah dilimpahkan kepada pemerintah daerah otonom. Pemerintah daerah otonom itu juga sanggup membangun itu, yang sulit bagi pemerintah daerah otonom adalah mendapatkan izin untuk membangun sendiri ya karena ini ada monopolistik ini dalam pengolahan limbah-limbah B3 ini. Ya, untuk mengurangi beban anggaran kementerian agar difasilitasi perizinannya supaya mudah. Kemudian nama-nama *Food Estate* ini juga ada untuk sentra kopi pangan. Pertanyaannya adalah apa yang menjadi tanggung jawab LHK, manakala tidak begitu penting dalam kondisi anggaran yang terbatas agar anggarannya digeser kepada yang lebih penting dalam rangka mencapai tujuan.

Kemudian 10 destinasi wisata prioritas yang kami cermati di lapangan mayoritas wisata-wisata di lingkungan LHK ini adalah kemitraan dengan masyarakat. Oleh karena itu, apa yang akan ditampilkan peran LHK dalam penggunaan anggaran ini karena kenyataannya di masyarakat adalah masyarakat sendiri membangun wisata itu dan manakala itu tidak sangat perlu alihkan kepada yang lain.

Kemudian yang ketiga dukungan manajemen. Dengan dukungan manajemen ini ya ini tujuannya untuk pengelolaan kinerja kementerian dan artikulasi dalam makro ekonomi pembangunan nasional. Dari sisi ini Bu Menteri ya bicara makro ekonomi tentunya kan orientasinya bagaimana pertumbuhan ditingkatkan untuk bisa meningkatkan pertumbuhan PDB ditingkatkan. Pada posisi anggaran yang sangat terbatas ya belanja non operasional lebih kecil daripada dukungan manajemen ini bagaimana solusinya ya agar apa yang disampaikan itu tidak menjadi narasi dalam sebuah perencanaan.

Kemudian terakhir ini Bu Menteri, pengolahan hutan berkelanjutan. Tujuannya adalah penanganan keterlanjuran penggunaan kawasan hutan. Saya hanya ingin menginformasikan pada kesempatan ini bahwa yang membuat keterlanjuran penggunaan kawasan hutan itu ya tidak hanya oleh masyarakat, tidak hanya kelompok usaha perhutanan sosial, tidak hanya kelompok tani hutan, tidak kedua hanya kelompok pemberdayaan kehutanan, tapi institusi yang diberikan tugas membuat peraturan perundang-undangan untuk bertanggung jawab mengelola hutan, sebut saja Perhutani.

Nah, oleh karena itu Kementerian LHK menerbitkan SK 287. Ini sudah mulai terjadi benturan ini Ibu Menteri. Kementerian LHK hendaknya melakukan sosialisasi, tujuan daripada dikeluarkannya SK 287 ini karena memang di lapangan hutan-hutan itu rusak, yang merusak bukan hanya masyarakat yang merusak pun juga Perhutani, sebut saja hutan produksi dari hutan jati diganti hutan karet gagal ditinggalkan, akhirnya menjadi rebutan dari oleh masyarakat. Siapa yang akan bertanggung jawab untuk mengembalikan hutan-hutan ini kalau tidak hadirnya pemerintah, karena tentunya kalau memang dari undang-undang harusnya Perhutani menjaga kelestarian hutan ini tapi kenyataannya pun juga hutan-hutan yang hijau sudah berubah jadi kebun tebu. Semuanya hutan lestari sudah tidak ada. Siapa itu adalah tugas dan tanggung jawab perilaku daripada Perhutani.

Oleh karena itu, pemerintah memang harus hadir tapi tentunya pemerintah harus menjelaskan kepada masyarakat tujuan dikeluarkannya SK 287 ini. Apalagi pada usulan 2 triliun anggaran ini di antaranya adalah untuk menindaklanjuti 287, SK 287, 735 miliar itu adalah untuk menyelesaikan persoalan apa namanya batas daripada pengukuhan hutan-hutan yang akan diselesaikan itu saja.

WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Pak Sutrisno, saya ingatkan waktu ya Pak Sutrisno ya.

F-PDIP (Dr. H. SUTRISNO, S.E., M.Si):

Baik ya. Terima kasih.

WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Terima kasih Pak Sutrisno.

Kita persilakan berikutnya Pak Hanan Rozak Fraksi Partai Golkar.

F-PG (Ir. H. HANAN A. ROZAK, M.S.):

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat pagi.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Pimpinan dan Anggota Komisi IV, Bu Menteri dan jajaran Eselon I, serta Dirut Perum Perhutani yang kami hormati,

Saya sedikit saja. Pertama terkait dengan koordinasi dan sinkronisasi program ya. Misalnya saja untuk yang menangani mangrove, Bu Menteri yang menangani mangrove ini ada BRGM, ada Badan Pengelola DAS ya kemudian ada mungkin pihak-pihak lain yang ikut mengelola KLHK apa namanya Kementerian Perikanan Kelautan. BRGM, tadi saya sudah sempat mengobrol sama Kepala BRGM bahwa BRGM bekerja di Sembilan Provinsi di dalam kawasan hutan. Oleh karena itu, terkait dengan percepatan perbaikan kawasan mangrove maupun cakupan sebaran luas apa namanya restorasi atau rehabilitasi, saya menyarankan BP DAS tidak masuk lagi dalam wilayah yang sembilan dikerjakan oleh BRGM, begitu juga nanti kita koordinasi ke Kementerian Kelautan Perikanan yang di luar ini, itu.

Nah, kemudian juga terkait dengan penggunaan anggaran-anggaran non APBN misalnya saja IPPKH untuk rehab atau restorasi mangrove maupun yang lainnya ya, itu hendaknya dibahas juga di forum ini di Komisi IV. Saya tidak pernah mendengar ada pembahasan terkait dengan penggunaan anggaran-anggaran di luar APBN untuk kegiatan-kegiatan. Harapan saya adalah minimal kita bisa ikut serta dalam menentukan lokasi-lokasi ya yang untuk kegiatan-kegiatan itu ya.

Pak, Bu Menteri dan peserta rapat yang saya hormati,

Khusus untuk Lampung ya, Lampung ini panjang pantai timurnya yang perlu mendapat perhatian tidak kurang dari 325 kilometer. Di situ ada yang sebagian lebih kurang mungkin ya sekitar 10 kilometer itu Taman Nasional Way Kambas yang berbatasan langsung dengan Laut Jawa. Mangrovenya mengalami kerusakan sebagian ya untuk itu ini perlu juga mendapat perhatian.

Selain itu, untuk percepatan perbaikan mangrove di Lampung Timur kami juga mengusulkan supaya Pantai Timur Lampung ini mendapat perhatian dengan penambahan anggaran. Ini mohon dukungan Pak Pimpinan, Pak Sudin sebagaimana Lampung juga diperhatikan mangrove-nya. Pembentukan Desa Peduli Mangrove tidak ada di situ Provinsi Lampung ya jadi Provinsi Lampung tidak masuk.

Saya kira ini tambahan dari saya intinya adalah bagaimana kita bisa melaksanakan tugas-tugas terkait dengan pelestarian, kemudian kesejahteraan masyarakat dalam dan maupun di luar kawasan hutan serta intinya adalah bagaimana menjaga kawasan hutan itu terkait dengan luasan dan fungsi serta keanekaragaman hayati.

Sebelum rapat ini saya sudah pernah menyampaikan perhatian terhadap penjagaan kawasan hutan pengamanan kawasan hutan. Tadi sudah sempat disinggung juga untuk menghadapi mungkin ada El Nino di tahun-tahun yang akan datang itu tentunya perkuatan kelembagaan maupun SDM di tingkat lapangan. Ini perlu kita perhatikan di 2023.

Demikian Pimpinan.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Terima kasih Pak Hanan atas masukannya dan tanggapannya.

Berikut kita persilakan dari Fraksi Partai Nasdem Bu Sri Kustina. Bu Sri silakan.

F-P. NASDEM (Ir. Hj. SRI KUSTINA):

Bismillahirrohmanirohim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Yang saya terhormat Pimpinan Komisi IV,
Yang terhormat teman-teman Anggota Komisi IV,
Yang terhormat Ibu Menteri KLHK beserta jajarannya.

Izinkan saya mewakili Fraksi Nasdem untuk membacakan pandangan dari Fraksi Nasdem. Pada Rapat Kerja yang berlangsung hari ini Fraksi Nasdem DPR RI mencermati beberapa hal di antaranya:

1. Fraksi Partai Nasdem DPR RI meminta BRGM untuk menyusun jadwal rehabilitasi mangrove yang sistematis sesuai dengan waktu tanam dan musim tanam yang tepat. Hasil rehabilitasi mangrove yang dilakukan pada tahun 2021 juga belum ada dipaparkan hasil monitoring dan evaluasinya. Fraksi Partai Nasdem DPR RI menilai keberhasilan rehabilitasi mangrove tidak diukur dari luasan lahan yang tertanam, melainkan tingkat persentase tumbuh mangrove tersebut. Hal ini dinilai sangat penting, mengingat target penurunan emisi gas rumah kaca yang bersumber dari *blue carbon* sangat potensial untuk mewujudkan target pemerintah dalam Zero Carbon 2040. Oleh sebab itu, Fraksi Nasdem DPR RI mendukung adanya penambahan anggaran untuk rehabilitasi mangrove tahun 2023 dengan menggunakan APBN ditambah dengan dana hibah yang berasal dari luar negeri.
2. Fraksi Partai Nasdem mengapresiasi jumlah usaha atau industri berbasis kehutanan yang telah diverifikasi SPLK sebanyak 4.477 dengan luasan 22,8 juta hektar. Jumlah ini harus terus ditingkatkan guna menambah daya jual produksi kehutanan Indonesia. Peluang Indonesia untuk meningkatkan pangsa pasar produksi kayu sangatlah besar, oleh karena itu pengawasan dalam bentuk sertifikasi harus terus digalakkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan guna terus mendapatkan kepercayaan pasar bahwa produksi kayu yang berasal dari Indonesia telah dipanen, diproses dan diekspor dengan mengedepankan prinsip berkelanjutan sesuai dengan hukum yang berlaku.
3. Permasalahan sampah masih menjadi perhatian penting bagi Fraksi Nasdem DPR RI. Belum meratanya pusat daur ulang, mengolah, pengolah

organik dan TPA yang memadai di setiap daerah masih menjadi kendala dalam penanganan sampah. Fraksi Nasdem DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menentukan target terbangunnya PDU di setiap daerah khususnya yang berada di lokasi wisata alam dan taman nasional. Dengan berkembangnya teknologi seperti RDF, penanganan sampah bisa menjadi jalan keluar untuk persoalan pembangunan TPA selalu terkendala akibat akan ketersediaan lahan yang terjadi di setiap daerah.

4. Jelang musim kemarau yang sebentar lagi dialami oleh Indonesia, Fraksi Partai Nasdem DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk memperkuat deteksi dini melalui satuan tugas dan memperbanyak posko-posko di lapangan untuk bisa pemantauan atau *ground check* dalam mencegah Karhutla. Hal ini tentu perlu didukung dengan anggaran yang cukup dalam mitigasi bencana lingkungan. Kegiatan seperti patroli bersama masyarakat merupakan program yang cukup efektif dalam melibatkan masyarakat sekitar kawasan hutan untuk turut menjaga dan melindungi hutan.

Juga pada kesempatan ini saya akan menanyakan beberapa hal karena ini berkaitan dengan daerah pemilihan. Pada bahan paparan di halaman 49 indikasi lokasi usulan penambahan anggaran Badan Standarisasi Instrumen Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) sebesar Rp17.500.000.000,- tahun 2023, di antaranya penambahan anggaran untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan ekonomi di sekitar kawasan hutan dengan tujuan khusus. Dengan target 11 Kabupaten Kota di Indonesia sebesar Rp5.500.000.000,- salah satunya ada di daerah pemilihan saya Kabupaten Pali. Yang akan saya tanyakan, apa bentuk kegiatan yang akan dilakukan di Kabupaten Pali nantinya untuk memberdaya, pemberdayaan masyarakat dalam peningkatan ekonomi masyarakat tersebut? Jadi sejauh mana program-program yang melibatkan peran aktif masyarakat tersebut di tahun 2023 ini nanti akan mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mengurangi pengangguran?

WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Bu Sri maaf, apa masih panjang? Mungkin nanti bisa diberikan masukannya.

F-P. NASDEM (Ir. Hj. SRI KUSTINA):

Ya terima kasih Pak.

Kebetulan sudah habis, terima kasih waktunya.

WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Terima kasih. Terima kasih Bu Sri. Nanti kalau ada yang belum nanti bisa diserahkan langsung ke.

Kami lanjutkan Pak Haerudin, Kang Haerudin Fraksi Partai Amanat Nasional. Silakan Pak.

F-PAN (HAERUDIN, S.Ag, M.H.):

Terima kasih Pimpinan.

Pimpinan, Anggota yang terhormat,
Ibu Menteri beserta seluruh jajaran Eselon I, Pejabat KLHK dan mitra-mitra kita dari BUMN, baik Perhutani, Inhutani, dan yang lain yang saya hormati, saya banggakan.

*Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.
Sampurasun.*

Ibu Menteri,

Pertama ingin kami sampaikan merespons dari apa-apa yang disampaikan dari beberapa hal yang menjadi perhatian apa namanya kegiatan kementerian ke depan pertama dari masalah KHDPK. Memang butuh pengamatan yang cermat dari tujuh bagian yang kita sendiri memang belum *khatam* semua tujuh itu apa saja yang akan dirilis nanti ke depan oleh KLHK.

Yang kedua, kita juga bisa melihat bahwa ke depan lahan yang menjadi Perhutanan Sosial itu pertama butuh dilihat dari sisi kewasannya. Jangan sampai animo PS, animonya sayuran, itu bisa korban kita itu di selatan itu semua di muara itu, bisa banjir bandang terus-terusan tiap tahun baik utara maupun selatan.

Yang ketiga, di ruang hutan lindung yang dipelihara oleh Perhutani itu sudah ada investasi baik LMTH baik Perhutani itu juga harus jadi pertimbangan. Yang ketiga, bagaimana juga di Perhutani juga ada pekerja dan yang lain juga tidak boleh menjadi korban dari kebijakan kita. Artinya ini butuh proses yang bijaksana dari sebuah agenda program yang kita terapkan. Bertahap dan tidak sekaligus tidak seperti apa yang kemarin mereka bersyukur. Sepuluh ribu orang bersyukur jadi PS kan animonya apa ya seperti zamannya presiden yang lalu ada penghancuran hutan lah kira-kira begitu, sehingga orang sudah dengan gelap mata enggak tahu ini cagar alam enggak tahu ini apa enggak tahu itu apa dihabisi hutan semua dan itu kita saksikan di daerah Jawa Barat Selatan terutama di Hutan Sancang dan sampai hari ini tidak bisa kita kembalikan menjadi hutan kembali. Itu yang luar biasa kejadian waktu itu.

Yang kedua Pak Ibu Menteri, kami ingin sampaikan dari kebijakan kita masalah cagar alam terutama kita ada Cagar Alam Sancang yang memang hari ini sangat menyedihkan, sudah jadi perkampungan. Kami mohon untuk didorong anggaran untuk EKF karena BKSDA Jawa Barat mungkin enggak ada duitnya. Kalau kita dorong EKF-nya Hutan Sancang mana yang rehab tanah itu, mana yang lindung, mana pemukiman yang bisa direlokasi, kan ada yang sekarang itu berapa tempat sudah jadi pemukiman yang mungkin harganya

akan mahal tapi apapun harus kita hadapi bagaimana merelokasi warga yang ada di Hutan Sancang menjadi ke daerah yang relatif bukan hutan. Artinya kan butuh pemetaan dan pemetaan itu butuh kajian. Kajian itu butuh anggaran, dan mohon Pak Sekjen mendorong ada anggaran untuk EKF untuk Hutan Sancang untuk BKSDA Jawa Barat.

Yang terakhir dari kam, Pak, urusan di Kehutanan di KLHK kita ini kami ingin sampaikan Pak Sekjen bahwa agenda-agenda strategis kita urusan hutan mohon untuk menjadi catatan. Daerah-daerah hulu bagaimana menjadi hutan itu sudah mulia Bu Menteri *Insyah Allah*. Kalau kita bisa mengembalikan seluruh daerah hulu sungai itu jadi hutan sudah mulia dan saya pikir "*ayyushodaqotin a'jabu alaika*", "Sedekah apa yang paling menakjubkan untukmu ya Rasul? "*Alma'u* air, hulu air terselamatkan adalah sedekah terhebat, termewah sepanjang zaman.

Yang terakhir untuk Perhutani Pak Dirut. Kami mohon penjelasan nanti ke depan tentang proses yang di Bondowoso. Atas nama keadilan orang ditahan 4 bulan dengan serta merta tanpa alat bukti dan ada patut diduga ada sebuah persekongkolan yang butuh diperjelaskan, dan itu orang ditahan 4 bulan mengebiri hak orang itu adalah pelanggaran hak asasi manusia. Saya tidak ingin situasi itu terus berlarut-larut dan Pak Dirut diam. Saya pernah telepon Kadipranya, "Kami akan sikat". "Sikat" tuh yang mana? Apa kawannya juga disikat. Kalau butuh memang ini ter persekongkolan, ganti semua dari Kapdipra Jawa Tengah sampai ADM Bondowoso itu.

Terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Terima kasih, Pak Haerudin.

Dan berikutnya kami persilakan Pak Muhammad Dhevy Bijak, Fraksi Partai Demokrat.

F-PD (MUHAMMAD DHEVY BIJAK):

Pimpinan,

Siap, ini melanjutkan dari teman-teman juga tadi menanggapi.

Bismillahirrohmanirohim.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Selamat siang.

Salam sejahtera untuk kita semua.

Pimpinan dan para Anggota yang saya hormati dan tentu yang saya banggakan,

Ibu Menteri, Pak Wamen, Pak Sekjen dan seluruh jajaran dari Kementerian KLHK, kemudian Pak Dirut, Perhutani dan seluruh jajaran yang hadir yang saya hormati dan tentu yang saya banggakan.

Seperti yang disampaikan oleh teman-teman tadi, kami pun dari Fraksi Demokrat ingin memberikan tanggapan, masukan sekaligus pertanyaan kepada Kementerian KLHK ini. Yang pertama terkait dengan RKP RKK K/L Tahun 2023, komposisi anggaran untuk pembangunan Kehutanan dan Lingkungan Hidup terlihat belum sepenuhnya berpihak karena dirasa masih kecil pagu anggarannya untuk kontribusi bagi masyarakat. Apalagi pagu anggaran untuk 2023 ini merupakan pagu anggaran yang terendah di lima tahun terakhir. Tentu kami berharap bahwa walaupun pagu anggaran ini semakin menurun kami berharap agar dipergunakan sebaik-baiknya.

Kemudian, kami pun ingin menanyakan pertama terkait dengan target PNBPN tahun 2023 sebesar 5,268 T atau meningkat 1,9% dari tahun 2020 eh 2022. Fraksi Partai Demokrat mempertanyakan beberapa hal: Yang pertama seperti apa perhitungan sehingga target PNBPN dipatok sebesar 5,268 T? Yang kedua, apa kendala dan masalah Ibu Menteri dalam melakukan penyerapan PNBPN ini? Ketiga, seperti apa strategi Bu Menteri untuk mencapai target PNBPN tahun 2023 sebesar 5,268 T?

Kemudian selanjutnya seperti yang disampaikan oleh dan disinggung oleh Pak Sutrisno dan Pak Hanan tadi terkait dengan pada tahun 2023 siklus 4 tahunan El Nino diprediksi akan terjadi, dapat menyebabkan kekeringan yang sangat parah dan memicu terjadinya bencana kebakaran hutan dan lahan. Untuk mendukung program dan kegiatan pencegahan serta pengendalian kebakaran hutan dan lahan tahun 2023, apakah pagu anggaran tahun 2023 ini sudah dimasukkan rencana penambahan sarana prasarana untuk mendukung kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan pada beberapa taman nasional?

Selanjutnya, terkait program perhutanan sosial, di mana saat ini banyak titik-titik IPHPS yang berubah menjadi areal pertanian yang tidak sesuai dengan Permen LHK Nomor 39 Tahun 2017 Pasal 13 ayat (2) terkait kewajiban-kewajiban pemegang izin untuk mempertahankan fungsi hutan. Penetapan kawasan hutan sudah berubah 100% menjadi tanaman pertanian dan tanpa dikombinasikan dengan tanaman pohon hutan. Oleh karena itu, kami dari Fraksi Partai Demokrat menanyakan bahwa bagaimana KLHK ini menindaklanjuti penyimpangan program perhutanan sosial ini? Kemudian apakah sudah ada peringatan kepada pemegang IPHPS yang melanggar kewajiban?

Selanjutnya terkait dengan rehabilitasi mangrove sampai tahun 2024 yaitu seluas 600.000 hektar. Pada tahun 2021 capaian rehabilitasi mangrove sebesar 34.911 hektar. Sampai saat ini berapa besar lahan mangrove yang sudah berhasil direhabilitasi dan berapa kekurangannya? Dan kemudian seperti apa strategi BRGM dalam mencapai target rehabilitasi 600.000 hektar mangrove sampai tahun 2024 dan dari mana sumber pendanaan dalam program rehabilitasi mangrove ini?

Kemudian, salah satu pilar dalam program utama KLHK adalah ketahanan bencana dan perubahan iklim, seperti apa pelaksanaannya? Kemudian capaian dan kendala yang dihadapi pada tahun sebelumnya dan saat ini 2020 serta apa rencana strategis untuk capaian tujuan tersebut di 2023 dan di masa akan datang?

Terakhir, Partai Fraksi Partai Demokrat mendukung pagu indikatif KLHK tahun 2023 sebesar 2,14 triliun, sehingga Pagu Indikatif KLHK tahun 2023 menjadi 8,32 T. Usulan tambahan pagu anggaran tertinggi pada Ditjen Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan (PKTL), yaitu sebesar 732,99 miliar atau 201,29% dari pagu indikatif atau pagu awal. Kemudian Ditjen PKTL, PKTL sebesar 364,15 miliar. Oleh karena itu, kami dari Fraksi Partai Demokrat meminta penjelasan terkait dengan usulan tambahan sebesar 201,29% pada Ditjen PKTL.

Mungkin itu saja Pimpinan yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

WAKIL KETUA KOMISI VI DPR RI (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Terima kasih dari Fraksi Partai Demokrat.

Berikut dari Fraksi PKB, Pak Daniel Johan waktu dan tempat kami persilakan.

F-PKB (DANIEL JOHAN, S.E.):

Ya terima kasih.

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pimpinan segenap sahabat Anggota, Bu Menteri dan seluruh jajaran,

Sudah banyak disampaikan oleh teman-teman tapi ada beberapa yang saya tegaskan atau saya sampaikan.

Yang pertama Bu Menteri, besok kita kan FGD oh Pak Wamen juga, jadi supaya lancar mohon yang data-data yang sempat diminta oleh Anggota bisa disiapkan Pak Sekjen ya sehingga semuanya bisa lancar, enggak terjadi ketegangan lagi.

Nah, yang kedua adalah saya ingin meyakinkan kepada Bu Menteri sekarang ini dunia akan mengarah ke kebijakan ESG (*Environment Social and Government*). Nah, sehingga Komisi IV meyakini RUU KSDA yang sedang kita bahas itu sebenarnya memperkuat posisi Indonesia dalam mewujudkan semakin mewujudkan penerapan ESG untuk menutupi kepingangan yang ada di UUCK/Undang-Undang Cipta Kerja yang oleh banyak pihak justru dianggap ini semakin menjauhkan Indonesia dari semangat atau penerapan ESG ya.

Jadi kita berharap RUU KSDA ini bisa punya kesamaan visi ini antara Komisi IV dengan Ibu Menteri dengan Kementerian KLHK sehingga nanti didalam FGD kita bisa sama-sama produktif dan bisa sama-sama mengawal sampai bisa menjadi undang-undang.

Nah, yang kedua, saya terima kasih atas respons yang cepat Bu Menteri melalui Pak Sekjen juga, kasus suku anak dalam yang dari zaman sudah dua kepemimpinan tetapi belum selesai terus. Info terakhir yang saya dapat bahwa persoalan suku anak dalam menjadi agak terlepas dari KLHK karena sekarang lokasi lahannya sudah APL katanya. Nah, tetapi saya berharap ini tetap bisa menjadi *leading*, KLHK bisa menjadi *leading* dalam membantu mengatasi persoalan-persoalan tanah seperti yang dihadapi oleh suku anak dalam yang sampai sekarang masih belum selesai ya. Kita berharap ini bisa menjadi contoh yang baik yang diwariskan menjelang akhir-akhir akan berakhirnya Pemerintahan Kabinet Indonesia Bersatu ini.

Yang ketiga, saya enggak tahu mudah-mudahan ini juga bisa dikawal untuk seluruh Dapil agar pemotongan-pemotongan tidak anggaran, penyusunan anggaran itu tidak dilakukan tidak memangkas untuk program-program yang berbasis masyarakat ya karena di Dapil saya itu cukup besar Bu sampai hilang setengahnya 8 M, sementara itu program yang menyangkut program masyarakat seperti Sekat Kanal, Program Ekonomi Masyarakat ya mudah-mudahan Dapil lain tidak mengalami, tetapi kita minta seluruh Dapil lah untuk program masyarakat agar menjadi prioritas perhatian.

Lalu yang keempat, kembali Bu terima kasih dukungan terhadap pemadam dan sudah saya sampaikan yang sebelumnya dan juga sudah saya kawal bersama dengan Pak Menteri agar ini tetap dilanjutkan.

Nah, terakhir ini masukan untuk mangrove Bu. Saya enggak tahu di daerah lain sama enggak tapi kalau sama kita prihatin dan kita khawatir. Contoh ya penanaman mangrove di Ketapang itu hampir 100% gagal. Bahkan, karena menanamnya pakai plastik, airnya mungkin airnya kencang, gagal karena copot semua dan plastiknya mengotori laut itu. Jadi harus ada evaluasi entah apakah Bu plastiknya itu diganti dengan anyaman bambu sejenis anyaman bambu atau apa dan memastikan penanamannya itu dia tidak copot dan sia-sia ya. Itu baru ditemukan di Ketapang, saya enggak tahu di daerah lain. Mudah-mudahan hanya di Ketapang seperti itu tetapi kalau di setiap penanaman mangrove kegagalannya 90%, waduh itu ratusan miliar hilang sia-sia ya.

KETUA RAPAT:

Cukup ya Pak Daniel?

F-PKB (DANIEL JOHAN, S.E.):

Ya, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Ya. Jadi setahu saya itu kalau penanaman mangrove itu protapnya plastiknya harus dibuang, berarti kalau begitu pejabat di Jakartanya, pejabat yang mewakilinya ke daerah tidak mengontrol langsung ke lapangan ya.

Teman-teman mumpung waktunya sudah mepet, apakah masih ada yang mau pedalaman? Kalau tidak ada, kami akan menampilkan jadwal FGD antara LHK dengan Komisi IV. Tolong dilihat dibesarkan dikit. Tolong dilihat apabila sudah kesepakatan, kita ambil keputusan. Tolong pemerintah dilihat dulu. Anggota bagaimana?

ANGGOTA:

Setuju.

KETUA RAPAT:

Pemerintah?

MENTERI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI:

Setuju, Ketua.

(RAPAT:SETUJU)

Kalau tidak ada pedalaman, silakan Bu Menteri menjawab secara singkat dan jelas semua pertanyaan plus juga saya minta tolong dibuatkan jawaban tertulis agar masing-masing nanti apabila ada Rapat Kerja lagi ada pegangan. Silakan.

MENTERI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI:

Terima kasih.

Pimpinan yang kami hormati,
Ibu dan Bapak Anggota yang kami hormati.

Saya berterima kasih atas semua catatan. Kami mencatat ini dan kami akan menyiapkan yang tertulis. Secara ringkas, izinkan saya menyampaikan beberapa *highlight*.

Pertama, soal ini harus tidak keliru karena audit sawit itu bukan konteks lingkungan, Bapak. Audit sawit ini kami tegaskan kepada Menko Maritim bahwa ini maksudnya adalah audit pembangunan BPKP dan bukan pada konteks audit lingkungan. Sebab kalau audit lingkungan itu ada aturan-aturannya dan ada pasalnya di Undang-Undang Lingkungan dengan segala konsekuensi bahwa nanti yang dipimpin oleh Kemenko Maritim tentang audit ini ada kaitan dengan lingkungan nanti kita akan lihat, yang akan melakukan audit juga adalah BPKP.

Kedua, beberapa hal tadi akan disampaikan dalam FGD seperti SK 287, tindak lanjut kegiatan dan sebagainya. Kemudian juga mungkin nanti ada soal RHL juga di FGD juga bagaimana desain kewajiban untuk rehab DAS. Saya berterima kasih atensi untuk Masyarakat Peduli Api, memang kita berusaha untuk meningkatkan terutama kesertaannya di dalam patroli. Kami sudah mencoba mengajak dan bersama-sama juga pada aspek kelegalitas paralegal.

Kemudian perizinan sarana limbah menjadi atensi. Saya kira tidak ada monopoli dan saya akan lihat pada daerah-daerah mana ada usulan untuk ini dan bagaimana kapasitasnya.

Tentang hutan sosial kami akan evaluasi, kita akan cek tadi kesalahan-kesalahan dan penyimpangan. Beberapa sudah dilakukan pengawasan dan peringatan oleh Dirjen PSKL tapi saya akan cek pada konteks yang proporsi agroforestry.

Soal rehab mangrove memang targetnya 600.000 hektar yang sudah dilakukan sejak 2018, 2019 sampai dengan 2021 kemarin 140.000 hektar, akan juga bertambah nanti dari World Bank 75.000 hektar dari Jerman 50.000 hektar dan nanti dari rehab DAS juga akan ada. Jadi ini nanti akan kita bahas di dalam FGD.

Yang lain-lain saya kira kami akan jawab tertulis juga termasuk untuk atensi terhadap daerah-daerah atau terkait aspirasi. Demikian juga soal beberapa hal tadi seperti apa evaluasi fungsi kawasan dan sebagainya.

Demikian, Pimpinan.

Sekali lagi kurang lebih mohon maaf.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih kepada Saudara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang telah menyampaikan jawabannya.

Apabila tidak ada lagi Anggota..

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Ya.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Saya pikir masih ada waktu sebentar.

Bu Menteri, terima kasih atas jawaban singkatnya tapi kita juga harus mendengar karena ada yang beberapa Anggota menyampaikan tentang masalah BRGM ya gambut, setidaknya harus disampaikan sehingga kita mendengar secara lisan dan tulisan.

Terima kasih, Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Silakan BRGM menjawab.

KEPALA BRGM:

Izin, Ibu Menteri.

Bapak Pimpinan, Bapak Ibu Anggota Komisi IV yang kami hormati,

Izinkan kami memberikan informasi singkat terkait dengan pelaksanaan percepatan rehabilitasi mangrove khususnya. Seperti kita ketahui bahwa Presiden menugaskan BRGM untuk melakukan percepatan rehab mangrove sampai tahun 2024 seluas 600.000 hektar dan dari target tersebut seperti yang tadi disampaikan pada tahun 2021 kita sudah merealisasikan hampir 35.000 hektar dari target 83.000 yang anggarannya disesuaikan karena pandemi Covid. Untuk tahun 2022 Bapak/Ibu sekalian, sampai dengan saat ini memang belum ada anggaran khusus untuk pelaksanaan rehab mangrove tahun 2022 meskipun kami bersama dengan Menko Kantor Menkoperek sedang membahas kemungkinan penambahan pagu anggaran dengan menggunakan pagu PEN. Namun demikian, sampai sekarang belum diputuskan berapa yang bisa dialokasikan untuk BRGM tahun 2022.

Untuk sumber dana anggaran lain, kemarin saya kira Bapak/Ibu sekalian mengikuti bahwa ada *launching* program percepatan rehab mangrove dengan World Bank. Khusus untuk dengan World Bank ini pelaksanaan hanya dikhususkan untuk empat provinsi besar, yaitu Sumatera Utara, Riau, kemudian Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur. Total luas yang akan difasilitasi oleh World Bank ini 75.000 hektar. Kemudian sisanya juga ada komitmen dari pemerintah Jerman yang juga akan membantu pelaksanaan percepatan rehab mangrove, prosesnya masih sedang berlangsung sementara untuk hibahnya sudah disetujui untuk tiga Provinsi: Sumatera Utara, Kalimantan Timur, dan Papua.

Di luar itu Bapak/Ibu sekalian, perlu kami laporkan bahwa rehabilitasi mangrove ini nantinya juga diharapkan bisa dilaksanakan melalui skema investasi dimana banyak para calon investor yang mengajukan proposal agar bisa dilibatkan di dalam pelaksanaan rehabilitasi mangrove. Namun demikian, untuk skema ini belum bisa kami tindaklanjuti karena menunggu regulasi yang sedang disusun yaitu pelaksanaan dari Perpres tentang Nilai Ekonomi Karbon. Khusus untuk investasi kami merencanakan pelaksanaan akan kami fokuskan di tiga Provinsi besar yang penduduknya relatif jarang tetapi kerusakannya cukup luas yaitu Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, dan Sumatera Utara.

KETUA RAPAT:

Sorry saya tanyakan, kenapa penduduk yang sedikit tapi penyebab mangrove-nya rusak berat. Apa sebabnya? Ditebang untuk arang kah atau apa atau abrasi?

KEPALA BRGM:

Baik, Bapak Pimpinan.

Berdasarkan *updating* peta mangrove yang dilakukan tahun 2021, di Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur ini kerusakan mangrove ini berupa tambak yang terbengkalai. Jadi statusnya masih kawasan hutan, bentuk fisiknya di lapangan berupa tambak tetapi sudah tidak ada aktivitas di situ. Ini yang prioritas akan dikembalikan melalui skema investasi.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Sudah?

KEPALA BRGM:

Enggeh, Pak.

KETUA RAPAT:

Kalau Anda hanya bilang Kalimantan Timur, Kalimantan Utara, berarti Anda tidak pernah ke lapangan. Anda ke Lampung saja itu, sekian ribu hektar tambak, tambak, tambak, tambak baik yang ada maupun terbengkalai, betul Pak Hanan? Lampung Timur itu kurang lebih hampir 5 kilometer abrasinya, karena apa? Bikin tambak, tambak, tambak tidak sukses tinggalin, tidak sukses ditinggalin. Enggak usah jauh-jauh.

Ya Mbak Alien silakan.

F-PG (ALIEN MUS, S.H.):

Baik, terima kasih Pimpinan.

Saya sebenarnya mau sampaikan hal itu tetapi Pak Ketua sudah sampaikan, saya pikir tidak perlu lagi saya sampaikan. Cuman Pak, saya ingin menyampaikan bahwa ada beberapa Provinsi tadi menjadi atensi dari World Bank. Tentunya ini saya juga berharap bahwa atensi tersebut bisa memberikan dampak yang luar biasa khususnya di carbon dari mangrove. Tapi Pak sesuai dengan masalah yang terjadi di lapangan selalu terjadinya abrasi dan kolom penanaman mangrove tidak dilakukan lagi dengan talud atau penahan ombak

percuma, Pak. Tanam pun enggak akan berhasil tapi ini mungkin kita akan bahas secara ya FGD tapi ini juga menjadi satu catatan bagi Komisi IV.

Kemudian Pak Ketua izin, saya harus menyampaikan juga ada beberapa Anggota yang menyinggung tentang Perhutani. Ini juga harus diberikan kesempatan untuk jawab karena banyak hal juga nanti kita bahas secara FGD tapi dalam rapat ini pun kita harus meminta jawaban dari yang bersangkutan.

Terima kasih.

KETUA RAPAT:

Oke terima kasih Bu Alien.

Silakan saya persilakan Perhutani setelah itu Inhutani apa yang ditanyakan oleh, setelah itu baru kita ambil kesimpulan rapat.

PERHUTANI:

Terima kasih, Pak Pimpinan.

Tadi ada beberapa hal terkait dengan Perhutani dari Pak Tri, kemudian dari Pak Haerudin. Secara rinci kami nanti akan siapkan jawaban tertulis. Untuk yang Pak Haerudin terkait dengan yang Bondowoso sebenarnya kami sudah menjawab secara tertulis Pak kasus yang tentang pencurian *snorkeling*. Nanti kami mohon izin Pak Haerudin untuk Bapak untuk menjelaskan posisinya ini saat ini sedang di Kepolisian dan menunggu sidang. Namun demikian, nanti kami akan mohon izin waktu Pak Haerudin untuk diskusi tentang ini Pak Pimpinan.

Kemudian yang lain-lain terkait dengan KHDPK. Saya rasa kami akan menunggu kebijakannya dan kami ingin men-*support* kebijakan ini supaya ketika ditetapkan bisa berjalan dengan baik di lapangan.

Saya rasa itu Pak Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Dari Inhutani ada yang mau bicara? Cukup?

Bapak dan Ibu yang kami hormati,

Dari diskusi, saran dan masukan, sebelum acara ini kita akhiri kami akan bacakan rancangan kesimpulan rapat pada hari ini.

Silakan Bu Ketua.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

Baik, terima kasih.

Pak Ketua, Bu Menteri, dan semua jajarannya.

Saya akan bacakan draf kesimpulan rapat kita kali ini.

1. Komisi IV DPR RI menyetujui Pagu Indikatif Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun Anggaran 2023 berdasarkan Surat Bersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala Bappenas Nomor S-353/MK.02/2022 dan B.301/M.PPN/D.8/PP.04.02/4/2022 tanggal 18 April 2022 sebesar Rp6.182.089.382.000,-. Selanjutnya, Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar pagu indikatif tersebut digunakan untuk menjaga kelestarian hutan dan pemulihan lingkungan hidup, peningkatan kesejahteraan, pemberdayaan dan penyadartahuan masyarakat di dalam dan di sekitar kawasan hutan, kegiatan pelestarian tumbuhan dan satwa yang dilindungi, serta kegiatan rehabilitasi hutan dan lahan, dan meningkatkan ketahanan bencana dan perubahan iklim termasuk di dalamnya pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan.

Para Anggota? Bu Menteri?

MENTERI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI:

Setuju, Ketua.

Terima kasih.

(RAPAT:SETUJU)

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

2. Komisi IV DPR RI menerima dan mendukung usulan tambahan Pagu Indikatif Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2023 sebesar Rp2.140.256.240.000,- sehingga alokasi anggaran yang semula sebesar Rp6.182.089.382.000,- menjadi sebesar Rp8.322.345.622.000,-.

Para Anggota? Bu Menteri?

MENTERI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI:

Setuju Ketua, terima kasih.

(RAPAT:SETUJU)

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI (ANGGIA ERMA RINI, M.K.M.):

3. Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Badan Restorasi Gambut dan Mangrove untuk mengalokasikan anggaran dalam rangka melaksanakan program pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan dalam menghadapi musim kemarau pada bulan Agustus 2022 serta siklus El Nino yang diprediksi akan terjadi pada tahun 2023.

Para Anggota? Bu Menteri?

MENTERI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI:

Setuju Ketua, terima kasih.

(RAPAT:SETUJU)

KETUA RAPAT:

Bapak dan Ibu yang kami hormati,

Sebelum kami menutup Rapat Kerja hari ini, kami persilakan Saudara Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan kata penutup dalam Rapat Kerja hari ini. Kami persilakan.

MENTERI KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN RI:

Terima kasih Ketua yang kami hormati.

Pimpinan, Ibu, dan Bapak Pimpinan yang terhormat.
Kemudian Ibu dan Bapak Anggota Komisi IV DPR yang kami hormati.

Saya menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi atas dukungan kepada kementerian untuk terus meningkatkan kinerjanya. Saya juga mohon izin dan mohon maaf atas berbagai kekurangan dan kita akan terus memperbaiki. Kami akan terus memperbaiki.

Terima kasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikumsalam.

Terima kasih.

Dengan demikian berakhir sudah Rapat Kerja pada hari ini.

Atas nama Pimpinan dan Anggota Komisi IV, mohon maaf apabila selama kami memimpin rapat ini ada kekurangan ada kekhilafan.

Dengan mengucapkan *Alhamdulillahirobbilalamin*, Rapat Kerja ini kami tutup.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 12.30 WIB)

a.n. KETUA RAPAT
SEKRETARIS RAPAT,

Ttd.

Drs. ACHMAD AGUS THOMY
NIP. 196508171988031002